

Mungkin keberadaan BNI Syariah akan menimbulkan pertanyaan di diri kita mengenai hubungannya dengan BNI Konvensional. Dilansir dari laman BNI Syariah didapatkan penjelasan bahwa secara organisasi, BNI Syariah merupakan salah satu unit dari BNI Konvensional, sehingga memiliki direktur yang sama. Akan tetapi khusus pengelolaan dana masyarakat yang masuk ke BNI Syariah dikelola secara terpisah dengan BNI Konvensional. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa pengelolaan dana masyarakat yang diinvestasikan di BNI Syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Pada tahun 2014 BNI Syariah telah memiliki 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu. Ditunjang dengan 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 Payment Point serta ditunjang dengan dapat digunakannya 1500 ATM BNI Konvensional semakin mengukuhkan BNI Syariah sebagai salah satu Bank Syariah Nasional yang maju dan besar. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin menyalurkan keuangannya melalui perbankan Syariah sebagai alternative investasi, maka BNI Syariah menyiapkan beberapa produk untuk menarik minat masyarakat Indonesia.

1. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah dan sesuai dengan prinsip syariah.
 2. Maksimum pembayaran RP.5 Milyar.
 3. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun kecuali untuk pembelian kavling maksimal 10 tahun atau disesuaikan dengan kemampuan pembayaran.
 4. Jangka waktu s/d 20 tahun untuk nasabah fixed-income.
 5. Uang muka ringan yang diakaitkan dengan penggunaan pembiayaan.
 6. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
 7. Pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.
- b. Landasan Hukum
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 tentang *murābahah*.
 2. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 3. Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

1. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan griya iB Hasanah datang ke kantor BNI Syariah terdekat.
2. Nasabah mengutarakan keinginannya untuk melakukan pembiayaan griya iB Hasanah kepada sales pembiayaan. Dan kemudian sales pembiayaan menjelaskan kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban nasabah serta hal-hal yang terkait dengan pembiayaan griya iB Hasanah tersebut.
3. Syarat-syarat yang telah disampaikan oleh marketing untuk dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan dan diserahkan ke bagian marketing.
4. Nasabah mengisi formulir pembiayaan griya iB Hasanah dan melengkapi data-data yang diperlukan BNI Syariah, yaitu:
 - a. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon
 - b. Foto pemohon 3X4
 - c. *Photocopy* surat nikah/ cerai
 - d. *Photocopy* kartu keluarga
 - e. *Photocopy* NPWP (untuk pembiayaan di atas Rp. 50 juta)
 - f. *Photocopy* rekening bank/buku tabungan 3 bulan terakhir
 - g. Surat keterangan kerja (asli) dan jabatan terakhir (bagi pegawai)
 - h. Surat keterangan penghasilan atau surat gaji
 - i. *Photocopy* SK pengangkatan awal dan akhir pegawai
 - j. SPT pajak 1 tahun terakhir (bagi perusahaan)
 - k. laporan keuangan Lapoan keuangan 2 tahun terakhir (bagi pengusaha)
 - l. *Photocopy* akta perusahaan, SIUP, TDP.

- m. *Photocopy* surat ijin profesi (bagi Profesional)
 - n. *Photocopy* sertifikat
 - o. *Photocopy* IMB
 - p. *Photocopy* SPPT dan STTS PBB Tahun terakhir.
 - q. Denah lokasi jaminan dan rumah tinggal
 - r. SPT Tahunan
 - s. Dan surat keterangan usaha
4. Setelah persyaratan lengkap maka pihak marketing mendatangi rumah nasabah dan menanyakan kebenaran syarat-syarat yang sudah di berikan kepada marketing. Kemudian menginput semua sistem pembiayaan dan akan di teruskan ke bagian *processing*.
 5. Sesudah diterima oleh bagian *processing*, pembiayaan dilakukan verifikasi, analisa dan investigasi terhadap calon nasabah dan obyek pembiayaan maupun jaminan.
 6. Resume dan advis dari bagian *processing* diusulkan ke bagian pemutus untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan
 7. Apabila terdapat penolakan maka akan disampaikan penolakan ke calon nasabah pembiayaan dan apabila disetujui maka surat persetujuan pembiayaan akan diberikan ke calon nasabah pembiayaan untuk menindak lanjuti dokumen-dokumen tersebut dan akan melakukan pencairan.
 8. Proses penaksiran jaminan pada pembiayaan griya iB hasanah adalah nilai taksasi yang di ajukan pada pihak nasabah ke pihak bank yang

- 2) Nasabah kesulitan dalam melakukan pembayarannya. Hal ini dikarenakan nasabah tidak ada pemasukan untuk melakukan pembayaran.
- 3) Nasabah mengalami PHK besar-besaran dalam perusahaan nasabah yang dinaungi. Sehingga mengalami kesulitan keuangan.
- 4) Perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional. Sehingga tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha.
- 5) Kemampuan manajemen yang kurang serta kemampuan pemasaran yang tidak memadai dikarenakan pengalaman yang terbatas.
- 6) Globalisasi ekonomi yang berakibat negative dengan adanya perubahan kurs mata uang.
- 7) Adanya kenaikan bahan baku sehingga produksi mengalami penurunan dan daya beli masyarakat yang menurun
- 8) Nasabah mengalami *force majeure*.

3. Langkah-Langkah Pengamanan Dalam Pembiayaan Yang Bermasalah

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur diharapkan akan berjalan dengan lancar. Bank berhati-hati dalam pengelolaan pembiayaan yang tertib dan demi pengaman dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap rekening debitur setiap bulan, yaitu dengan mengawasi rekening koran debitur.

- 2) Melakukan pengawasan secara langsung dengan mengunjungi usaha debitur agar pembiayaan tepat sasaran dan dalam operasionalnya tidak sampai melakukan keputusan yang beresiko tinggi.
- 3) Melakukan pengawasan dengan cara memantau informasi debitur melalui Bank Inonesia, apakah debitur termasuk dalam daftar hitam.

Langkah-langkah di atas adalah langkah-langkah represif, jika langkah-langkah di atas telah dilakukan dan terjadi suatu pembiayaan macet/debitur tidak memenuhi kewajibannya maka bank akan menyebut debitur tersebut wanprestasi.

Bank BNI Syariah Cabang Surabaya mempunyai kriteria sendiri terhadap debitur yang dianggap wanprestasi, yaitu:

- 1) Debitur tidak memenuhi kewajiban pembiayaan, maksudnya yaitu debitur tidak melakukan pembayaran nisbah/ bagi hasil dan pokok pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan pokok dan nisbah.bagi hasil.
- 2) Debitur dalam melakukan pembayaran tidak berkesinambungan.

Apabila debitur melakukan wanprestasi pihak bank biasanya memberikan sanksi kepada debitur. Akan tetapi perlu ditelusuri mengapa debitur tersebut wanprestasi, apakah debitur wanprestasi karena terpaksa (faktor usaha sedang turun). Selama debitur mempunyai itikad baik bank akan memberikan toleransi dalam hal pembayarannya. Jika debitur memang dengan sengaja tidak membayar angsuran karena tidak ada itikad

baik dari pihak debitur. Maka bank akan mengambil langkah-langkah hukum sebagai jalan keluarnya.

4. Teknis Penetapan *Ta'wīd* Dalam Pembiayaan *Murābahah* Griya iB Hasanah

Penyaluran pembiayaan *murābahah* mengandung banyak resiko yang sangat penting untuk diperhatikan oleh BNI Syariah Cabang Surabaya. Maka perlu dilakukan upaya dalam strategi pengajuan permohonan pembiayaan *murābahah* yang dilakukan BNI Syariah Cabang Surabaya dalam menganalisa calon nasabah baik mengisi formulir permohonan pembiayaan *murābahah* dan kemudian diteliti serta diseleksi oleh pihak bank, karena keberhasilan suatu bank tidak dapat dilihat hanya dari sisi besarnya pembiayaan yang direalisasikan. Akan tetapi pihak bank juga harus memperhatikan aspek kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan.

Namun, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, resiko pembiayaan bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satu pun bank di dunia ini tidak memiliki pembiayaan bermasalah, karena tidak mungkin semua pembiayaan yang disalurkan semuanya lancar.

Untuk menghindari nasabah yang bermasalah, BNI Syariah cabang Surabaya telah melakukan analisa yang mendalam terhadap usaha dan penghasilan serta kemampuan nasabah.

Adanya nasabah bermasalah khususnya pada pembiayaan *murābahah* menjadi beban bank karena pembiayaan bermasalah menjadi salah satu faktor dan penentu kinerja suatu bank. Maka BNI Syariah melakukan

debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Yaitu mealukan penambahan jumlah pembiayaan. Bila bank beranggapan bahwa usaha nasabah masih dapat dihidupkan kembali. Intisari pertimbangan bank adalah pada segi prospek usaha nasabah masih baik untuk dikembangkan dan manajemennya masih dapat dipercaya.

Jika semua tindakan diatas sudah dilakukan oleh BNI Syariah tetapi nasabah tidak bisa melakukannya, Survey kerumah nasabah sehingga memerlukan biaya. Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya telepon, surat, mendatangi langsung nasabah, dan biaya-biaya yang lain yang terkait dengan penagihan. pihak BNI Syariah memberlakukan *ta'wīd* maka perinciannya sebagai berikut: Kerumah nasabah 4 kali maka dapat diakumulasikan keseluruhan Rp 50.000 x 4 = Rp 200.000.

Apabila nasabah telah melakukan dengan cara di atas tetapi nasbah tidak mampu melunasi hutangnya dan tidak ada perkembangan dalam usahanya maka penyelesaiannya dengan melakukan penjualan jaminan. Pihak bank melakukan eksekusi jaminan tanpa melauai pengajuan gugatan perdata terlebih dahulu.

Eksekusi atau penyitaan adalah menyelesaikan pembiayaan dengan menjual, menguasai jaminan yang diberikan nasabah karena melihat

